

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

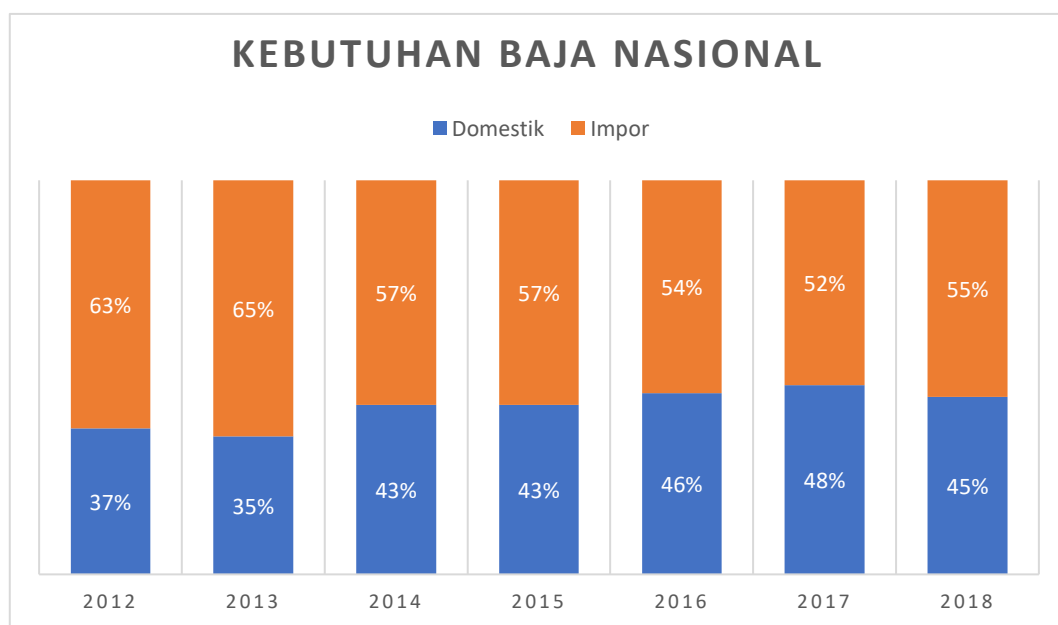
### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, menyatakan bahwa badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 juga menjelaskan bahwa BUMN terbagi dalam dua jenis badan usaha yaitu, perseroan dan perusahaan umum (perum). BUMN (perseroan) dan perum dibagi kedalam dua kelompok besar yaitu BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan yang bergerak di bidang usaha non keuangan. Pada BUMN yang bergerak pada bidang usaha non jasa keuangan, digolongkan kembali kedalam dua kelompok, yaitu perusahaan infrastruktur dan perusahaan non infrastruktur

Evaluasi terhadap kinerja suatu perusahaan sangat diperlukan dalam rangka melihat seberapa jauh keberhasilan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP - 100/MBU/2002 menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja BUMN yang bergerak di bidang non jasa keuangan. Ketiga aspek tersebut adalah keuangan, operasional, dan administrasi. Dari ketiga aspek tersebut, dapat dinilai tingkat kesehatan suatu perusahaan BUMN. Dalam mengukur kinerja BUMN pada aspek keuangan, terdapat delapan rasio yang dijadikan indikator, yaitu imbalan kepada pemegang saham (ROE), imbalan investasi (ROI), rasio kas (*cash ratio*), rasio lancar (*current ratio*), *Collection Periods*, Perputaran Persediaan, Perputaran Total Aset, Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset. Rasio - rasio tersebut berlaku untuk perusahaan infrastruktur maupun non infrastruktur.

Ada banyak BUMN yang bergerak di berbagai sektor. Salah satunya sektor industri baja. Industri baja pada hakikatnya berbeda dari industri lainnya. Industri baja merupakan industri strategis yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan material industri - industri nasional lainnya dalam jangka panjang. Menteri

Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa industri logam disebut sebagai *mother of industry*. Sebab, produk logam dasar merupakan bahan baku utama bagi kegiatan sektor industri lain, diantaranya industri automotif, maritim, elektronika, serta permesinan, dan peralatan pabrik (Yovanda, 2017). Selama tahun 2012 hingga 2018, kebutuhan baja nasional masih banyak dipasok oleh produk baja impor. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik kebutuhan baja nasional selama tahun 2012 hingga 2018.



Sumber: Public Expose PT Krakatau Steel (Data diolah)

**Gambar 1. 1**  
**Kebutuhan Baja Nasional**

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa selama tahun 2012 hingga 2018, kebutuhan baja nasional masih banyak dipasok oleh baja impor. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry (IISIA) Hidayat Triseputro (Tanpa Nama, 2019) menyatakan bahwa baja impor dari china bisa lebih murah 28 persen dari harga pasar. Selain itu, Faktor tambahan seperti bea masuk impor baja yang sangat rendah juga turut memukul industri baja dalam negeri.

PT Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang tergolong kedalam perusahaan non infrastruktur dan bergerak pada bidang industri baja. Inti kegiatan

usaha yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel adalah pengolahan dan penjualan produk baja. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan volume produksi dan penjualan produk baja selama tahun 2012 hingga 2018 (dalam ton/unit).

**Tabel 1. 1**  
**Volume Produksi dan Penjualan PT Krakatau Steel Tahun 2012 - 2018**

Tahun	Penjualan	Produksi	Presentase
2012	2.307.870	2.904.382	79%
2013	2.375.957	2.917.182	81%
2014	2.316.121	2.212.684	105%
2015	1.941.844	1.793.482	108%
2016	2.237.920	2.017.237	111%
2017	1.900.075	1.689.324	112%
2018	2.142.133	2.034.399	105%

Sumber: Laporan Tahunan PT Krakatau Steel (data diolah)

Bila dilihat pada tabel, presentase penjualan produk PT Krakatau Steel cenderung meningkat tiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 2014 hingga 2018, presentase penjualan produksi melebihi volume produksinya. Hal ini membuktikan bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Krakatau Steel masih banyak diminati oleh konsumen baja. Permasalahan yang muncul pada PT Krakatau Steel adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dikutip dari CNBC Indonesia (Kusumo, 2019), PT Krakatau Steel mencatatkan kerugian selama tujuh tahun berturut - turut. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan rugi (setelah pajak) PT Krakatau Steel periode 2012 hingga 2018

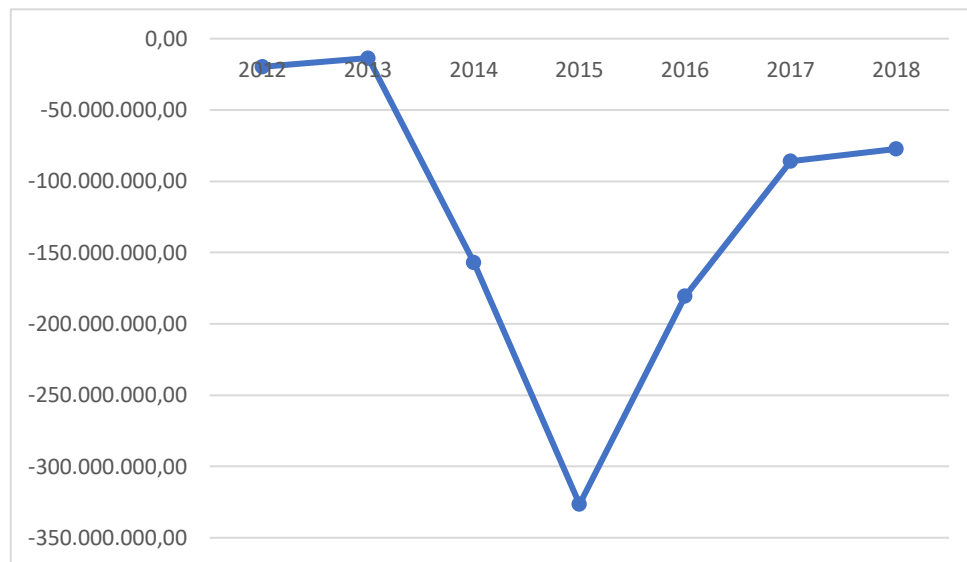
**Tabel 1.2**  
**Rugi (Setelah Pajak) PT Krakatau Steel Tbk Periode 2012 – 2018**  
**(Dalam US Dollar)**

Tahun	Rugi (Setelah Pajak)
2012	-19.560.000,00
2013	-13.600.000,00
3014	-156.892.000,00
2015	-326.514.000,00
2016	-180.724.000,00

Tahun	Rugi (Setelah Pajak)
2017	-86.097.000,00
2018	-77.163.000,00

Sumber: Laporan Keuangan PT Krakatau Steel

Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan fluktuasi kerugian PT Krakatau Steel selama tahun 2012 hingga 2018.



Sumber : Laporan Keuangan PT Krakatau Steel

**Gambar 1.2**  
**Rugi (Setelah Pajak) PT Krakatau Steel Tbk Periode 2012 – 2018**  
**(Dalam US Dollar)**

Pada grafik terlihat bahwa sepanjang tahun 2012 hingga 2018 PT Krakatau Steel selalu memperoleh kerugian. Selama tahun 2012 hingga 2015, kerugian perusahaan cenderung meningkat. Sedangkan, pada tahun 2016 hingga 2018, kerugian perusahaan cenderung mengalami penurunan. Dalam hal ini, perusahaan telah mampu untuk menekan angka kerugian. Kerugian terbesar yang dialami oleh perusahaan terjadi di tahun 2015. Sedangkan, kerugian terkecil yang dialami oleh perusahaan terjadi di tahun 2013.

Kerugian yang dialami PT Krakatau Steel berdampak pada melemahnya harga saham pada perusahaan tersebut. Berdasarkan RTI *business*, sejak awal tahun harga

saham KRAS terus menurun 14,47%. Pelemahan sudah terlihat sejak lima tahun terakhir, saham KRAS terkoreksi hingga 46,75% (Intan, 2020). Menurunnya kinerja keuangan pada perusahaan, dapat menjadi sinyal buruk bagi investor dan calon investor untuk tidak berinvestasi pada perusahaan tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Perusahaan BUMN pada hakikatnya merupakan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada profit, namun juga harus berorientasi pada kepentingan negara. Maka dari itu, perusahaan BUMN harus memiliki kinerja keuangan yang baik agar dapat berkontribusi pada negara secara terus menerus.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. (Munawir, 2007) mengatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang pada umumnya menjadi perhatian khusus bagi para penganalisa yaitu: (1) Likuiditas, (2) Solvabilitas, (3) Rentabilitas atau profitabilitas, dan (4) Stabilitas

Pada perusahaan BUMN non jasa keuangan. Standar penilaian kinerja dijelaskan di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP - 100/MBU/2002. Penilaian kinerja perusahaan BUMN yang mengacu pada surat keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Di dalam surat keputusan tersebut, dijelaskan bahwa untuk menilai kinerja perusahaan BUMN non jasa keuangan terdapat tiga aspek yang harus dinilai, yaitu aspek keuangan, aspek administrasi, dan aspek operasional. Dari hasil perhitungan ketiga aspek tersebut, dapat diketahui kondisi perusahaan BUMN apakah dalam kondisi sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Dalam hal ini, peneliti hanya meneliti kinerja PT Krakatau Steel hanya sebatas pada aspek keuangannya.

Di dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP - 100/MBU/2002, terdapat delapan rasio yang digunakan sebagai indikator penilaian kinerja perusahaan pada aspek keuangan. Delapan rasio tersebut, yaitu *Return on Equity* (ROE), *Return on Investment* (ROI), rasio kas, rasio lancar, *Collection Periods* (CP), Perputaran

Persediaan, *Total Asset Turnover* (TATO), Rasio Total Modal Sendiri (TMS) terhadap Total Aset (TA).

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri (Wiagustini, 2010). ROE menunjukkan kemampuan modal pemilik yang ditanamkan oleh pemilik atau investor untuk menghasilkan laba bersih yang menjadi bagian dari pemilik. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan perusahaan.

*Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur *return* (tingkat pengembalian) investasi yang diterima pemegang saham. Sartono (2010) berpendapat bahwa ROI merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan jumlah seluruh aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja keuangan perusahaan.

Rasio kas merupakan rasio likuiditas yang menjamin pembayaran hutang jangka pendek (Sudana, 2011). Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Semakin tinggi nilai rasio ini belum tentu baik. Semakin tinggi nilai rasio ini dapat mencerminkan semakin tinggi uang kas yang mengendap dan tidak dikelola oleh perusahaan.

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki (Sujarweni, 2017). Rasio lancar menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang dimiliki, baik kas, *marketable securities*, piutang usaha, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik perusahaan tersebut.

*Collection Periods* merupakan rasio yang menunjukkan berapa lama (hari) penjualan terikat pada piutang atau berapa lama waktu yang diperlukan sejak perusahaan itu melakukan penjualan, sampai dengan penerimaan pembayaran tunai (Rangkuti, 2011). jika rasio perputaran piutang semakin rendah berarti ada *over investment* dalam piutang

Perputaran Persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa kali dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam setahun (Syamsuddin, 2009). Rasio perputaran persediaan menunjukkan seberapa efektif penggunaan persediaan perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik.

*Total Asset Turnover* (TATO) atau Perputaran Total Aset merupakan ukuran efektifitas pemanfaatan dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar perputaran total aktiva atau semakin cepat berputar, maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola total aktiva untuk menghasilkan penjualan (Rangkuti, 2011)

Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Rangkuti (2011) berpendapat bahwa “total modal sendiri merupakan seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya dibagi total aset yang dikurangi dengan dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan”. Semakin tinggi rasio ini berarti, semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.

Penilaian aspek keuangan perusahaan BUMN yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP - 100/MBU/2002 memiliki standar bobot pada masing - masing indikator. Bobot yang diterima merupakan skor yang diberikan dari hasil perhitungan tiap - tiap indikator. Tabel berikut merupakan standar bobot dari masing - masing rasio pada aspek keuangan.

**Tabel 1.3**  
**Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan**

Indikator	Bobot	
	Infra	NonInfra
imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
imbalan investasi (ROI)	10	15
Rasio Kas	3	5
Rasio Lancar	4	5
<i>Collection Periods (CP)</i>	4	5
Perputaran Persediaan (PP)	4	5
Perputaran Total Aset/ <i>Total Aset Turnover (TATO)</i>	4	5

Rasio Total Modal Sendiri (TMS) terhadap Total Aset (TA)	6	10
<b>Bobot</b>	50	70

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP - 100/MBU/2002

Berdasarkan tabel di atas, standar bobot untuk penjumlahan dari seluruh indikator harus mencapai 50 pada perusahaan infrastruktur dan 70 untuk perusahaan non infrastruktur. Pada tabel di atas juga diperlihatkan standar bobot untuk masing - masing indikator. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan BUMN non infrastruktur. Itu artinya, untuk masuk ke dalam kategori perusahaan dengan keuangan yang sehat, PT Krakatau Steel harus memiliki total bobot penilaian seluruh indikator sebesar 70.

Ada beberapa peneliti yang telah meneliti terkait dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP - 100/MBU/2002. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ergiyanti et al (2017). Hasil dari penelitian yang dilakukan olehnya dengan objek PT Telkom Indonesia periode 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memperoleh predikat kinerja keuangan yang sehat pada kedua tahun tersebut

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Melyani (2019). Penelitian yang dilakukan olehnya merupakan analisis kinerja keuangan pada PT Gas Negara periode 2013 hingga 2017. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan tersebut dari tahun 2013 hingga 2017 termasuk ke dalam kategori sehat karena telah mencapai standar kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2016) terkait dengan kinerja keuangan PT Indofarma (persero) Tbk periode 2012 hingga 2014. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan tersebut memperoleh predikat sehat hanya pada tahun 2012. Sedangkan, untuk tahun 2013 dan 2014, kinerja keuangan memperoleh predikat kurang sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lasmana dan Wijayanti (2016) pada kinerja keuangan PT Garuda Indonesia periode 2011 hingga 2015. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memperoleh predikat kinerja keuangan yang sehat hanya pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015. Sedangkan pada tahun 2015 kinerja keuangan nya memperoleh predikat kurang sehat.



Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP - 100/MBU/2002 (Studi pada PT Krakatau Steel Tbk periode 2012 – 2018)”

### **C. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah gambaran kinerja keuangan PT Krakatau Steel Tbk dari tahun 2012 hingga tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP - 100/MBU/2002 yang mencakup rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas.
- 2) Bagaimanakah solusi terhadap permasalahan kinerja keuangan PT Krakatau Steel.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai kinerja keuangan PT Krakatau Steel Tbk, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kinerja keuangan PT Krakatau Steel Tbk dari tahun 2012 hingga tahun 2018 yang mencakup rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas dan memberikan solusi terhadap masalah kinerja keuangan yang terdapat di PT Krakatau Steel.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan maupun bagi pihak yang tidak berkepentingan. Lebih khususnya, penelitian ini diharapkan mampu untuk melengkapi penelitian yang sudah dilakukan dan diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian - penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lain.

## 2. Praktis

Adapun secara empiris, manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a) Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak investor untuk berinvestasi di perusahaan BUMN tersebut
- b) Sebagai bahan evaluasi bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya khususnya kinerja pada aspek keuangan